BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik melalui studi pustaka dan beberapa wawancara yang mendalam, telah didapatkan hasil yang cukup untuk mengembangkan dan menjelaskan fokus penelitian yang telah disampaikan pada Bab I hingga bab III dan juga menjawab permasalahan yang peneliti akan jelaskan pada Bab IV ini.

4.1 Hubungan Luar Negeri Tiongkok dan Iran pada Masa Pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)

Tiongkok dan Iran yang telah memiliki hubungan yang baik sejak 200 tahun sebelum masehi, hingga tahun 2003 saat Hu Jintao memimpin masih memiliki hubungan yang bahkan semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan kedua negara yang tidak pernah terlibat dalam konflik apapun dan tidak pernah ada pemutusan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Iran.

Hubungan yang paling dinikmati oleh Tiongkok dan Iran yaitu di bidang ekonomi yang sangat luas meskipun mendapat beberapa hadangan dari sanksi Dewan Keamanan PBB. Kerjasama lain dari kedua negara juga di bidang energi dan konstruksi. Selain dari pada itu, dengan banyaknya perusahaan Tionghoa yang beroperasi di Iran menjadi sebuah bukti keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kehadirannya di pasar Iran.

Tiongkok telah muncul sebagai mitra ekonomi bagi Iran dengan menanamkan investasi yang besar di sektor energi serta mengisi kesenjangan

yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan Barat yang dipaksa keluar karena sanksi internasional. Tahun 2008, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dan *National Iran Oil Company* (NIOC) menandatangani kesepakatan senilai $1,76 miliar untuk mengembangkan minyak Iran di Azadegan Utara yang mana dapat menghasilkan lebih dari 75 ribu barel minyak per hari terhitung mulai tahun 2012. Di tahun 2009, Tiongkok menjadi mitra dagang paling penting bagi Iran dengan pertukaran bilateral senilai $21,2 miliar yang mana pada tahun 2006 hanya mencapai $14,4 miliar. Selain itu, CNPC juga kembali menandatangani kesepakatan dengan NIOC senilai $5 miliar untuk mengembangkan lapangan fase 11. Proyek tersebut dirancang untuk menghasilkan sekitar 2 miliar m^3 gas dan 70 ribu barel kondesat gas per hari. CNPC menggantikan *French Energy Giant Total* setelah mengundurkan diri dari proyek ini (http://www.irantracker.org/foreign-relations/china-iran-foreign-relations#_ftn45 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Masih di tahun 2009, Iran meminta Tiongkok untuk melakukan investasi di beberapa proyek ekonomi senilai $42,8 miliar termasuk pembangunan 7 kilang minyak baru. Tiongkok menyetujui untuk melakukan beberapa investasi yang diminta oleh Teheran, bahkan Tiongkok menawarkan membangun 10 *offshore jack-up drilling platform*, 7 rig pengeboran tanah dan 2 *crane float* dengan total biaya sebesar $2,2 miliar (*Iran China Sign Oil Deal from IRNA,* 4 Agustus 2009).

Di tahun selanjutnya, Sinopec dan CNPC melakukan penandatanganan senilai $4 miliar sebagai kontrak dengan Teheran untuk meningkatkan produksi kilang minyak di Iran (http://www.ft.com/cms/s/0/b858aceB-a7a4-11de-b0ee-00144feabdc0.html?nclick_check=1 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Posisi Tiongkok adalah pengekspor utama untuk minyak mentah Iran, bagi Iran sendiri Tiongkok adalah pengekspor bensin karena kurangnya kapasitas penyulingan di Iran. Di bulan September 2009, Tiongkok meningkatkan pasokan bensin ke Iran menjadi sepertiga dari total impor bensin Iran. Dapat diperkirakan bahwa Tiongkok mengirimkan antara 30ribu hingga 40ribu barel per hari ke Iran melalui perantara pihak ketiga. Pada bulan April 2010, sebagai sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap impor bensin Iran, anak Perusahaan CNPC mengekspor 600ribu barel bensin ke Iran senilai $110 juta. Selain itu, perusahaan perdagangan Sinopec yaitu Unipec setuju untuk mengirim 250.000 barel ke Iran melalui pihak ketiga di Singapura (http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=124095&sectionid=351020103 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Pada bulan Maret 2010, *North Iran Drilling Company* (NIDC) yang dikelola oleh negara menandatangani kontrak dengan CNPC untuk membeli rig minyak yang akan digunakan di teluk Persia. Perjanjian dengan nilai $143 juta ini diharapkan dapat dilaksanakan 8 bulan setelah penandatanganan. Perusahaan ini juga berharap dapat menambah dua rig tambahan dalam waktu

dekat (*Iran's NDC in $143m Deal with CNPC Unit from Mehr News Agency,* 6 Maret 2010).

Perusahaan Tionghoa secara signifikan meningkatkan kehadiran mereka di *Iran's 15th International Oil, Gas and Petrochemical Exhibition*. Acara yang diadakan pada bulan April 2010 ini melihat partisipasi Tiongkok tumbuh sekitar 300% dibandingkan dengan peningkatan keseluruhan terhitung sebesar 10% dalam partisipasinya (*Number of Chinese Firms at Tehran's ExhibitionIncreases 3 Folds from IRNA,* 14 April 2010). Tiongkok juga secara ekstensif terlibat dalam bidang non-migas dari perekonomian Iran. Di bulai Mei 2009, pada konferensi ekonomi bersama di Teheran, kedua negara menandatangani sejumlah perjanjian senilai $17 miliar dalam kerjasama di bidang ekonomi. Dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa Tiongkok membantu Iran dalam sektor konstruksi, tuan rumah pertemuan perdagangan bersama dan mengembangkan sistem perkeretaapian Iran. Iran juga akan membangun pusat perdagangan baru di sebagian provinsi Muslim Xinjiang Tiongkok (http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=95112&sectionid=3510213 diakses pada tanggal 20 Mei 2014). Selain itu, para pejabat Tionghoa telah menyatakan minat mereka dalam memperluas partisipasi dalam pengembangan deposit titanium Iran dan infrastruktur pertambangan (*China Keen To Invest in Titanium Mines in Iran's Kerman Province from Fars News Agency,* 28 April 2008).

Selain bidang ekonomi, sejak tahun 2005 Iran telah menjadi pengamat bagi Tiongkok-Rusia dalam *Shanghai Corporation Organization* (SCO),

sebuah badan kerjasama regional yang terdiri dari negara-negara Asia Tengah. SCO sering dipandang sebagai upaya kekuatan Timur untung menantang unipolaritas Amerika Serikat. Iran mengajukan permohonan pada bulan Maret 2008 untuk bergabung dengan organisasi tersebut sebagai anggota tetap (http://www.cfr.org/publication/10883/#6 diakses pada tanggal 20 Mei 2014). Pada bulan Juni 2009, para pemimpin Tiongkok dan Iran bertemu di Rusia. Selama pertemuan SCO, Presiden Tiongkok, Hu Jintao memberikan pernyataan bahwa Teheran dan Beijing harus saling membantu untuk mengelola perkembangan global dalam mendukung negara mereka, sebaliknya jika tidak maka negara yang merupakan faktor dari masalah-masalah internasional akan mampu menguasai dunia (*Iran, China Calls For A Long-term Strategy To Expand Bilateral Ties from Iranians Students News Agency*, 17 Juni 2009).

Selain kerjasama di forum multilateral SCO, Iran telah mendukung tujuan kebijakan luar negeri Beijing. Teheran telah menyatakan persetujuan kebijakan satu Tiongkok, yang mana menolak kemungkinan Taiwan untuk terpisah dan independen (*Iran, China To Cement Cooperation from Fars News Agency,* 28 Juli 2008). Setelah kerusuhan etnis Muslim Tionghoa di Provinsi Xinjiang pada bulan Juli 2009 yang menewaskan lebih dari 156 orang dan sekitar 1000 orang ditahan, Menteri Luar Negeri saat itu, Manouchehr Mottaki, menyatakan dukungan untuk hak-hak Muslim di Tiongkok. Presiden Hu mengumumkan bahwa setiap orang yang bertanggung

jawab atas kejadian itu akan dihukum dengan berat (*Iran Voices Support For Rights of Chinese Muslims from Press TV Online*, 9 Juli 2009).

Kementerian Luar Negeri Iran melalui juru bicaranya, Hassan Qashqavi menyatakan bahwa kasus ini dapat mengganggu hubungan bilateral negaranya dengan Tiongkok dan berharap Umat Islam di Tiongkok mendapatkan hak yang sama dengan etnis atau agama lain (*Xinjian Incidents Had Nothing To Do With Religion: Chinese Diplomat from Mehr News Agency,* 23 Juli 2009). Selain itu Iran juga mengutuk intervensi negara lain dalam urusan internal Tiongkok (*Iran Backs Muslims But Rejects Interference in China: FM Spokesman from Iranian Students News Agency*, 27 Juli 2009). Di bulan Agustus sebagai tindak lanjut masalah itu, Iran dan Tiongkok melalui para pejabat Kementerian Luar Negerinya bertemu untuk melakukan peninjauan, dimana Iran membantu dalam melakukan pelayanan keagamaan bagi penduduk Muslim Tionghoa (*Iranian, Chinese Officials Review Incidents in Xinjiang from Mehr News Agency,* 2 Agustus 2009).

Di tahun 2010, tidak terjadi perubahan terhadap hubungan kedua negara, namun sedikit perubahan ditunjukkan oleh Tiongkok terhadap sikapnya dalam mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi sanksi untuk Iran, masih terkait program nuklirnya. Namun dalam hal ini Hu Jintao menjelaskan dukungannya terhadap PBB bukan berarti setuju untuk memberikan sanksi bagi Iran, tetapi Tiongkok meminta Iran untuk dapat bekerjasama dengan IAEA melalui laporan mengenai aktifitas nuklirnya agar terbukti bahwa Iran tidak melakukan pengembangan senjata nuklir.

Hingga tahun 2013, selama Presiden Hu Jintao memimpin Tiongkok, hubungan dengan Iran tetap berjalan dengan baik. Tiongkok melalui kebijakan-kebijakannya terus memberikan dukungan bagi Iran dalam mengembangkan nuklir selama itu bertujuan untuk damai dan meminta negara-negara Barat terutama Amerika Serikat agar dapat menghentikan pemberian sanksi bagi Iran dan menyelesaikan kasus nuklir ini melalui jalan diplomatik tanpa harus adanya sanksi apalagi kekerasan.

4.2 Kepentingan Tiongkok terhadap Pengembangan Nuklir di Iran

Sejak tahun 1990-an, peran Tiongkok dalam pasar energi global meningkat secara dramatis, yang mana antara tahun 2005 hingga 2008 pertumbuhan PDB Tiongkok tahunan rata-ratanya mencapai 10 persen, yang mana puncaknya pada tahun 2007 yaitu mencapai 13 persen. Untuk mendorong petumbuhan ini, Tiongkok telah mengimpor sejumlah besar energi dan pada tahun 2006 Tiongkok menjadi negara ketiga didunia sebagai pengimpor minyak terbesar (*U. S. Energy Information Administration: China Country Analysis Briefs on July 2009*).

Petumbuhan Tiongkok tentu akan terus berlanjut dan menurut *International Energy Agency*, pada tahun 2025 Tiongkok akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai pengimpor minyak dan gas terbesar di dunia. Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang mendorong perusahaan energi nasional untuk melakukan investasi pada proyek luar negeri dalam upaya mengamankan sumber jangka panjang. Melalui kebijakan ini, perusahaan Tionghoa memiliki investasi dalam eksplorasi minyak dan gas serta proyek

produksi dalam berbagai negara termasuk Iran. Perusahaan-perusahaan Tionghoa berinvestasi dalam sektor minyak dan gas alam Iran, memberikan Iran peralatan energi utama, teknologi dan layanan, memberi Iran minyak olahan dan membeli produk minyak bumi Iran (*U. S. Energy Information Administration: China Country Analysis Briefs on July 2009*).

Alasannya sudah jelas mengapa Tiongkok memiliki kepentingan untuk bekerja sama dalam sektor energi dengan Iran. Iran memiliki cadangan minyak yang terbukti terbesar ketiga di dunia dan memiliki cadangan gas alam kedua setelah Rusia. Pendapatan dari ekspor minyak lebih dari 24 persen dari produk domestik bruto Iran, menurut perkiraan Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat, 80 persen dari pendapatan ekspor, dan hingga 76 persen dari pendapatan pemerintah (http://www.gao.gov/new.items/d10721t.pdf diakses pada tanggal 20 Mei 2014). Namun, meskipun cadangan sumber daya alam negara Iran besar, infrastruktur energi Iran telah berkarat. *The Wall Street Journal* mencatat bahwa industri minyak Iran bisa terkepung di jalan untuk melewati tonggak yang memalukan sehingga pada tahun 2015 digantikan oleh mantan musuh bebuyutannya, Irak, sebagai produsen minyak terbesar kedua di Timur Tengah (http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704569204575328851816763476.html diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Kerjasama Tiongkok dan Iran di bidang energi cukup luas. Pada tahun 2009, perdagangan bilateral Tiongkok dan Iran mencapai $21,2 milyar, yang mana pada tahun 2006 hanya $14,4 milyar. Kenaikan mencapai 6,8 milyar

selama 3 tahun tentu sangatlah besar (Laurent Maillard, "*China Takes Over from West as Iran's Main Economic Partner*," AFP, 15 Maret 2010). Tiongkok pertama kali mengimpor minyak mentah dari Iran pada tahun 1974. Di tahun 2009, Tiongkok melampaui Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar Iran. Untuk mendukung hubungan dengan Tiongkok, Iran membuka pusat perdagangan pertama di Shanghai dan berencana untuk membuka empat pusat perdagangan lain yang tersebar di Tiongkok. Selanjutnya pada tahun 2010, Iran mengumumkan bahwa konsorsium perusahaan Tionghoa dan Australia memenangkan kontrak senilai $750 juta untuk mengembangkan tiga ladang minyak Iran di Bushehr Selatan (http://www.iranenergyproject. org/1399/chinese-australian-consortium-to-develop-3 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Tiongkok semakin banyak berinvestasi dalam kedua proyek energi hulu dan hilir di Iran, terutama melalui perusahaan besar milik negara seperti *China National Petroleum Corporation (CNPC) dan Sinopec*. CNPC aktif di sejumlah situs di Iran, termasuk *Masjed-i-Suleiman*, *Azadegan* Utara, *Azadegan* Selatan, dan ladang minyak *Kuhdasht*, serta di bidang gas *Pars* Selatan. Menyeimbangkan keterlibatan CNPC dalam kegiatan di hulu, Sinopec juga telah bekerja untuk membantu meningkatkan kapasitas penyulingan minyak Iran. Dengan membantu Iran mengembangkan cadangan minyak dan gas, Tiongkok menjamin akses lanjutan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pada bulan Juli 2010, Wakil Menteri minyak Iran Hossein Noqrehkar Shirazi

menyatakan bahwa Tiongkok telah menginvestasikan sekitar $40 miliar pada sektor energi Iran, dan volume investasi tiongkok di proyek-proyek hulu adalah $29 miliar dan bahwa Tiongkok telah menandatangani sekitar $10 milyar dari kontrak dengan Iran untuk petrokimia, kilang dan proyek pipa. Selain itu, pada tahun 2009, Tiongkok mengimpor sekitar 460.000 barel per hari (bph) minyak mentah dari Iran, sekitar 15 persen lebih dari pasokan sesuai kontrak. Namun, impor Tiongkok dari minyak mentah Iran turun pada tahun 2010 karena Tiongkok bergerak untuk mengurangi ketergantungan terhadap Iran. Selama semester pertama tahun 2010, Iran dalam posisi tetap sebagai pemasok ketiga terbesar, Iran dikabarkan mengirimkan 9 juta ton minyak mentah ke Tiongkok, penurunan 31,2 persen dalam pasokan selama periode waktu yang sama di tahun sebelumnya (*FACTBOX-Ties binding China and Iran*, *Reuters*, 5 Agustus 2010).

4.3 Dukungan Tiongkok terhadap Pengembangan Nuklir di Iran

Tiongkok secara jelas menentang sanksi PBB sesuai dengan prinsip Hu Jintao sebagai Presiden Tiongkok selama tahun 2003 hingga 2013. Tiongkok tidak mau mendukung resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB kepada Iran terkait program nuklirnya. Tiongkok selalu percaya bahwa sanksi dan tekanan tidak harus menjadi pilihan dan tidak akan kondusif bagi upaya diplomatik saat ini atas isu nuklir Iran.

Dari hasil studi pustaka ditemukan bahwa program nuklir yang dijalankan oleh Iran merupakan program dalam negeri yang pada awalnya tidak ada sangkut pautnya dengan negara lain, apalagi bila disangkutpautkan dengan

keamanan negara sekitarnya. Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan negaraya, Iran selalu berusaha untuk bersifat independen dengan meminimalisir semaksimal mungkin ketergantungannya dengan negara lain. Prospek kebijakan luar negeri Iran pasca resolusi DK PBB no. 1737 tahun 2006 terkait dengan program nuklirnya tidak membuat banyak mengalami perubahan. Iran akan tetap melanjutkan program nuklirnya walaupun konsekuensi dijatuhkannya sanksi non-militer akan dialami oleh Iran.

Tiongkok mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB 1929, yang mana menekankan hubungan potensial antara pendapatan Iran berasal dari sektor energi dan pendanaan kegiatan proliferasi sensitif nuklir Iran. Resolusi itu juga menyatakan keprihatinan bahwa peralatan kimia dan bahan yang dibutuhkan untuk industri petrokimia memiliki banyak pengaruh kepada masyarakat sipil yang diperlukan untuk kegiatan daur ulang bahan bakar nukir tertentu yang sensitif. Sekalipun Tiongkok mendukung resolusi 1929, perusahaan Tionghoa dengan jelas menyatakan tetap melakukan bisnis di sektor energi dengan Iran. Ketika Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Australia sibuk menentukan sanksi baru terhadap Iran, pejabat Tionghoa melakukan pertemuan dengan pejabat Iran untuk membicarakan rencana kerjasama di bidang energi. Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok tidak bergeming dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB karena Tiongkok sendiri merupakan anggota Dewan Keamanan PBB yang selama ini menolak sanksi terhadap Iran dan mengharapkan permasalahan nuklir Iran dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi sehingga tidak

merugikan pihak manapun (http://m.news.viva.co.id/news/read/280286-perusahaan-minyaknya-disanksi-as--china-marah diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Berdasarkan hasil analisa, Tiongkok selama masa kepemimpinan Hu Jintao terus menegaskan bahwa Tiongkok tetap mendukung pengembangan nuklir di Iran, dan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Hu Jintao dapat dikatakan sebagai kebijakan yang diambil dalam memandang permasalahan nuklir di Iran. Tiongkok tetap berpandangan positif kepada Iran karena selama ini saat IAEA melakukan pemantauan ke semua pusat reaktor nuklir di Iran, belum ditemukan satupun penyimpangan yang dilakukan oleh Iran guna menggunakan nuklir sebagai senjata pemusnah masal. Iran juga merupakan negara yang menandatangani NPT yang mana berisi larangan untuk memproduksi senjata nuklir, namun memberikan hak kepada setiap negara untuk memproduksi nuklir bila bertujuan untuk damai, hal ini dijelaskan dalam beberapa penelitian yang peneliti dapatkan dalam studi literatur yang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Iran kembali melakukan pengembangan nuklir saat Iran mengalami masalah ekonomi dan menjadikan nuklir sebagai sumber listrik di Iran.

Tiongkok memberikan dukungan dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli dan material-material yang dapat membantu pengembangan nuklir di Iran. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok guna memenuhi kepentingan nasionalnya, yang mana Tiongkok membutuhkan minyak yang dimiliki oleh Iran. Karena dukungan yang diberikan oleh Tiongkok, Iran pun memberikan timbal balik

dengan menjamin pasokan gas selama 25 tahun terhitung tahun 2004. Kepentingan nasional Tiongkok tentunya terbantu dengan kerjasamanya dengan Iran. Karena kemajuan pesat teknologi di Tiongkok, maka dari itu kebutuhan untuk mendukung hal tersebut seperti halnya minyak juga terus meningkat, sehingga menjadi tujuan utama Tiongkok untuk mencari cara memenuhi kepentingannya tersebut seperti yang dilakukan Tiongkok dengan Iran.

4.4 Respon Iran terhadap Dukungan Tiongkok pada Pengembangan Nuklir di Iran

Iran sendiri adalah negara yang mulai stabil sistem pemerintahannya pada tahun 1979 pasca revolusi Islam. Republik Islam Iran mempertahankan hukum agama dan memiliki pengadilan agama untuk menafsirkan semua aspek hukum. Konstitusi Republik Islam Iran, lembaga kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Iran semuanya berdasarkan atas prinsip dan norma-norma Islam. Semua keputusan resmi harus sesuai dengan Al-Quran dan hukum Islam.

Sistem teokratis Iran dan bentuk kebijakan dalam negerinya pada kenyataannya, merupakan sistem yang sangat komplek. Namun, untuk memahami bagaimana sistem kerja pemerintah, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa Pemimpin Agama Agung Ali Khamenei adalah satu-satunya penguasa, bersama-sama dengan lingkaran dalam terdekatnya disebut Beite Rahbari (http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=19544). Beite Rahbari terdiri dari ulama dan tentara, yang terutama telah ditunjuk untuk

melindungi anggota agamawan dari Beite Rahbari. Jumlah pasti ulama milik Beite Rahbari tertutup dan rahasia, dan tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya mereka. Ada puluhan setidaknya dari mereka, semua pribadi dipilih oleh Ali Khamenei. Ali Khamenei dan kelompoknya Beite Rahbari memiliki semua kekuasaan atas kebijakan dalam dan luar negeri Iran (Artikel 91 Constitution of the Islamic Republic of Iran http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=583:1388-11-17-15-3946&catid=84:1388-11-03-08-40-10&Itemid=222 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

4.4.1 Masa Pemerintahan Mohammad Khatami

Di tahun 2003 saat Presiden Hu Jintao baru memimpin Tiongkok, Iran masih dipimpin oleh Mohammad Khatami. Di tahun inilah masalah nuklir Iran mulai muncul dan tentunya Khatami sebagai Presiden di kala itu mempunyai andil dalam menyelesaikan masalah ini walaupun belum menjadi masalah internasional dan belum adanya sanksi terhadap Iran.

Kerjasama Iran dan Tiongkok belum begitu muncul di dunia internasional karena hubungan kedua negara masih terlihat biasa sebelum masalah nuklir di Iran menjadi masalah internasional. Bentuk-bentuk dukungan Tiongkok juga belum bisa dilihat pada masa pemerintahan Khatami sehingga Iran juga belum memberikan respon besar.

Respon yang paling terlihat pada masa pemerintahan Khatami yaitu Iran memberikan pasokan gas kepada Tiongkok selama 25 tahun terhitung dari tahun 2004. Hal ini dilakukan Iran karena selama ini Iran dan Tiongkok telah memiliki hubungan yang baik (http://kanshaforlife.wordpress.com/2012

/09/18/respon-rusia-dan-cina-menyikapi-sanksi-pbb-atas-nuklir-iran-2006-2008-sebuah-studi-komparasi/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Selama pemerintahan Khatami, hubungan dengan Tiongkok berjalan seperti biasa, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum adanya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainya. Begitu juga bantuan Tiongkok terhadap Iran mengenai pengembangan nuklir Iran dimana masalah nuklir Iran baru mulai muncul dan dalam proses penelitian IAEA. Iran masih fokus terhadap penyelesaian masalah dan agar masalah nuklir ini tidak menjadi masalah internasional, walaupun pada akhirnya Amerika Serikat membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB (http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/06/29/files/2010/06/nuklir-iran-antara-pujian-dan-kecaman.doc diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Khatami sebagai pemimpin Iran melakukan penolakan terhadap tuduhan yang diberikan oleh dunia internasional mengenai pengembangan senjata nuklir. Khatami mengatakan tidak akan pernah menghentikan proses pengembangan nuklir di Iran dan Khatami meyakinkan bahwa Iran tidak akan pernah mengembangkan senjata nuklir. Apa yang berkembang di dunia internasional mengenai masalah pengembangan senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh Iran merupakan sebuah bentuk kekhawatiran negara-negara Barat karena Khatami sebagai pemimpin Iran saat itu telah memberikan pernyataan jelas bahwa Iran mengembangkan nuklir dengan tujuan damai(http://muzainiyeh---fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-59288

-mbp%20timur%20tengah-nuklir %20iran.html diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

4.4.2 Masa Pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad

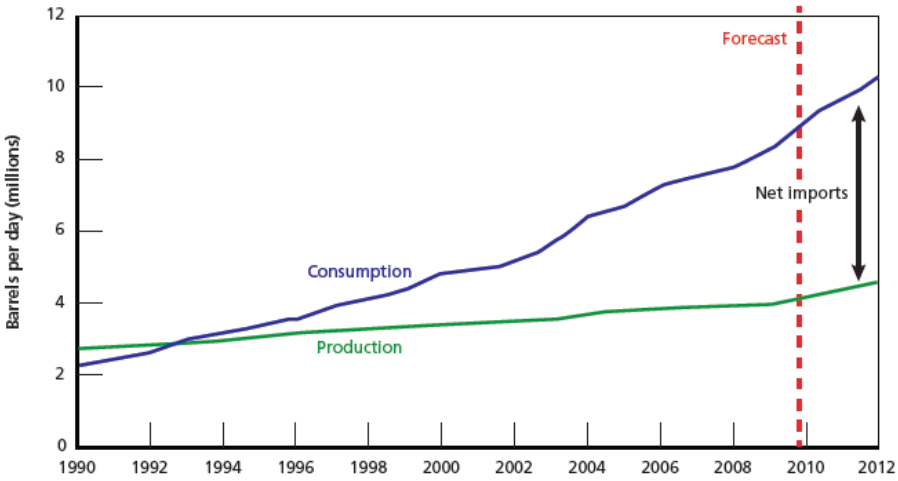
Tahun 2005, Khatami digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad melalui proses pemilu. Pada masa pemerintahan Ahmadinejad mulai diterapkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB terhadap pengembangan nuklir Iran. Iran mendapat dukungan dari Tiongkok yang mana menolak menandatangani resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut. Tiongkok menganggap sanksi tidak akan menyelesaikan masalah (http://en.m. wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Iran menanggapi dingin sanksi yang diberikan pada negaranya terkait pengembangan nuklirnya. Ahmadinejad yang dikenal keras terhadap Amerika Serikat juga bersikap keras dan akan tetap melanjutkan proses pengembangan nuklirnya. Tiongkok mengharapkan adanya negosiasi antara negara-negara yang bermasalah dengan nuklir Iran agar masalah ini dapat segera diselesaikan, namun dengan sikap Ahmadinejad yang kuat terhadap keputusannya, Amerika Serikat jadi enggan untuk melakukan proses diplomasi (http://indonesian.cri.cn/1/2008/04/16/1@80410.htm diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Selama bertahun-tahun Tiongkok terus memberikan dukungannya melalui penolakan terhadap sanksi-sanksi yang diberikan kepada Iran oleh Dewan Kemanan Tetap PBB dengan resolusinya. Selama pemerintahan Mahmoud

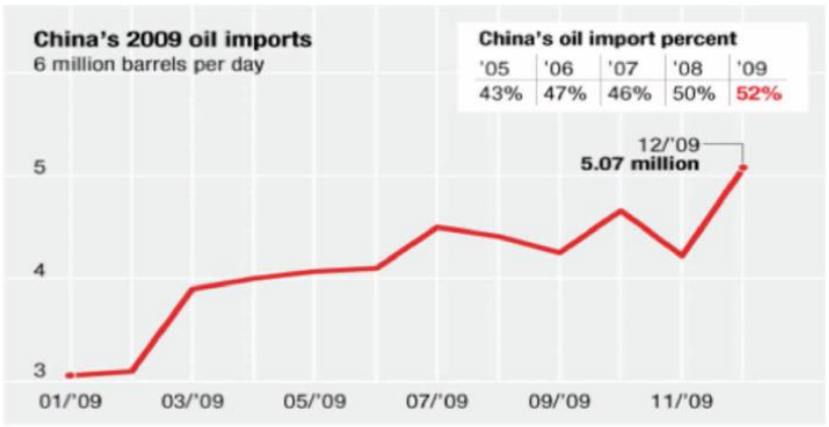
Ahmadinejad telah dikeluarkan sebanyak 9 resolusi yang dimulai dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Tiongkok juga masih tetap melakukan kerjasama dengan Iran walaupun jelas tertulis dalam resolusi bahwasanya tidak boleh adanya perdagangan dengan negara Iran terutama yang berhubungan dengan pengembangan uranium (http://m.jpnn.com/news.php?id=827088 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Iran sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan oleh Tiongkok, sehingga seperti yang sudah dijelaskan bahwa pilar utama hubungan kedua negara adalah di bidang ekonomi, sehingga Iran terus melakukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok yang mana memberikan Tiongkok kesempatan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Iran memberikan ekspor minyak ke Tiongkok cukup besar. Melalui perusahaan-perusahaan Tionghoa juga Iran memberikan banyak jalan bagi Tiongkok untuk melakukan pengolahan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh Iran. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa kebutuhan konsumsi minyak Tiongkok hanya dapat dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain, salah satu yang terbesar yaitu Iran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk respon Iran di masa Ahmadinejad yang mana sangat terbantu dengan dukungan dari Tiongkok terutama dalam hal sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan Tetap PBB yang tentunya termasuk sanksi-sanksi sepihak dari Amerika Serikat yang dirangkum dalam resolusi tersebut.



(Sumber: *U.S. Energy Information Administration, "China: Analysis," May 2011*)

Gambar 4.4.1
Tingkat Produksi – Konsumsi Minyak di Tiongkok



(Sumber: *Michael J. Economides and Xina Xie, "China's Oil Imports Continued Upward Trend in '09," Energy Tribune, www.energytribune.com*)

Gambar 4.4.2
Peningkatan Impor Minyak Tiongkok Tahun 2009

Dari kedua gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan impor minyak Tiongkok sangat besar guna memenuhi kebutuhan rakyatnya, maka dari itu sebagai salah satu bentuk respon Iran dimasa kepemimpinan Ahmadinejad adalah melalui ekspor minyak kepada Tiongkok yang mana Iran menjadi relasi Tiongkok terbesar dalam hal kerjasama di impor minyak.

Iran adalah negara dengan kepemimpinan yang keras dan tegas sehingga hanya dengan cara baik-baiklah seperti halnya cara diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok yang dapat membuat Iran menghaluskan sikap kerasnya dan hingga akhirnya pada tahun 2009 Iran mengurangi pasokan uraniumnya sebanyak 20 persen, walaupun proses pengembangan nuklir tetap dilakukan oleh Iran. Tidak menjadi masalah bagi Tiongkok, karena dengan pengurangan pasokan uranium yang dilakukan oleh Iran, Tiongkok melihat Iran sebagai negara yang dapat diajak untuk bekerjasama, begitupun Iran yang menerima dengan lapang dada karena Iran sendiri tidak merasa dirugikan dengan sikap Tiongkok kepada Iran (http://m.hizbut-tahrir.or,id/2013/03/13/amerika-menyerang-kesepakatan-atas-masalah-nuklir-iran/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Memang hubungan Iran dan Tiongkok hingga tahun 2010 sangatlah baik. Namun di tahun 2010 muncul perbedaan sikap dari Tiongkok kepada Iran. Tiongkok melakukan penandatanganan sanksi kepada Iran melalui resolusi Dewan Keamanan Tetap PBB 1929 tahun 2010.

Hal ini memang cukup mengejutkan beberapa pihak, namun Hu Jintao menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok memiliki alasan yang jelas. Menurut Presiden Hu, Iran melakukan kesalahan besar karena tidak dapat bekerjasama dengan IAEA dengan menghalangi IAEA melakukan pemantauan ke beberapa reaktor nuklir di Iran. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sudah sebanyak 5 kali sebelum akhirnya Tiongkok ikut menyetujui sanksi bagi Iran.

Kelima resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB berisi peringatan bagi Iran agar Iran menghentikan pengayaan uraniumnya, namun yang terjadi Ahmadinejad tetap memerintahkan pengembangan nuklirnya agar tetap dilakukan. Hal inilah yang membuat geram negara-negara Barat dan Tiongkok melihat kondisi ini cukup berbahaya bagi hubungannya dengan Iran terutama di bidang ekonomi dan energi (http://iran-un.org/en/ 2010/04/21/21-april-2010/ diakses pada tangggal 20 Mei 2014).

Di balik perubahan sikap yang dilakukan oleh Tiongkok, kerjasama dan hubungan persahabatan antara Iran dan Tiongkok ternyata berkembang cukup baik. Para pemimpin kedua negara mempertahankan hubungan kedua negara agar tetap berjalan. Pada bulan September 2010, Li Changchun, Anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral CPC, mengunjungi Iran. Dia bertemu dengan Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan Ketua Parlemen Ali Larijani dan mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Mirtaj Aldini. Li Changchun memberikan evaluasi positif dengan situasi hubungan Tiongkok dan Iran dan membuat 4 mendalam mengenai hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara, yaitu:

- Pertama, kedua belah pihak harus menjaga pertukaran tingkat tinggi untuk memperdalam rasa saling percaya dalam bidang politik.
- Kedua, kedua belah pihak harus memajukan kerjasama yang praktis untuk mencapai *win-win solution*.

- Ketiga, kedua belah pihak harus memperkaya pertukaran budaya untuk meneruskan persahabatan yang mendalam yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
- Keempat, kedua belah pihak harus memelihara komunikasi dalam urusan internasional untuk menegakkan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan ini dan sekitarnya (http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2818_663626/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Pada bulan Juni 2010, Presiden Ahmadinejad menghadiri acara *National Pavilion Day Event for Iran* dalam rangkaian *Shanghai World Expo*. Ahmadinejad bertemu dengan Yu Zhengsheng, Anggota Biro Politik Komite Pusat CPC dan Sekretaris Komite Partai Kota Shanghai, dan mengetuai acara tersebut. Pada tanggal 1 April 2010, Penasihat Negara Dai Bingguo dan Menteri Luar Negeri Yang Jiechi mengadakan pertemuan terpisah dengan mengunjungi Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung dan Kepala Negosiator Nuklir Iran Saeed Jalili. Kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan masalah nuklir di Iran.

Kerjasama ekonomi bilateral dan perdagangan mencapai pertumbuhan yang sangat mantap. Pada bulan Agustus 2010, Wakil Perdana Menteri Li Keqiang bertemu dengan Menteri Minyak Masoud Mirkazemi Seyed. Pada bulan Oktober 2010, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Perkeretaapian Liu Zhijun mengunjungi Iran. Beliau mengadakan pembicaraan dengan Menteri Jalan dan Transportasi Hamid Behbahani dan

menandatangani MoU Kerjasama antara Departemen Kereta Api dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Jalan dan Transportasi Republik Islam Iran (http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2818_663626/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Kerja sama bilateral di bidang pendidikan, olahraga dan kebudayaan membuat hasil yang bermanfaat. Pada tanggal 28 September 2010, MoU kerjasama ditandatangani antara Administrasi Umum Pers dan Publikasi Tiongkok dan Departemen Kebudayaan serta Bimbingan Islam Iran dan antara *China Central Television* (CCTV) dan *Broadcasting* Republik Islam Iran. Pada hari yang sama, stasiun wartawan dari CCTV di Teheran diresmikan.

Pada bulan November 2010, Ali Saeidlou, Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas olahraga, menghadiri upacara pembukaan *Asian Games* di Guangzhou. Beliau bertemu dengan Liu Peng, Menteri Administrasi Umum Olahraga dan Ketua Panitia *Asian Games*, dan mereka menandatangani MoU kerjasama olahraga antara kedua negara. Pada bulan Desember 2010, Wakil Presiden Saeidlou dan Wakil Presiden Masoud Zaribafan, yang bertanggung jawab atas urusan yang berkaitan dengan penyandang cacat, menghadiri upacara pembukaan *Asian Para Games* di Guangzhou (http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2818_663626/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Beberapa kerjasama yang dilakukan di tahun 2010 antara Iran dan Tiongkok menunjukkan bahwa walaupun Tiongkok ikut memberikan sanksi bagi Iran, hubungan kedua negara tetap terjalin di segala bidang. Bentuk sanksi yang dikeluarkan oleh DK PBB melalui resolusinya menjadi jalan bagi Tiongkok memberikan peringatan kepada Iran agar dapat bekerjasama dengan IAEA dan agar posisi Iran di dunia internasional tetap aman.

4.4.3 Masa Pemerintahan Hassan Rouhani

Di tahun 2013, Iran kembali berganti pemimpin. Hassan Rouhani menjadi Presiden Iran di tahun ini. Di awal kepemimpinannya, Rouhani banyak mengadaptasi kebijakan Ahmadinejad. Walaupun kebijakan yang dimiliki Rouhani tidak berbeda jauh dengan kepemimpinan sebelumnya, karena kita tahu bahwa siapapun Presiden Iran selalu tunduk dan mengikuti aturan dari Pemimpin Agung Iran, namun sikap dan gaya kepemimpinannya berbeda jauh dengan Ahmadinejad (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rouhani diakses pada tanggal 21 April 2014).

Sikap Rouhani yang berbanding terbalik dengan Ahmadinejad adalah saat Rouhani menyatakan bahwa Iran siap membuka diri dan mau memperbaiki hubungannya dengan negara Barat terutama Amerika Serikat. Walaupun sikap yang ditunjukkan terkesan pro dengan Barat, namun Rouhani menegaskan bahwa Iran akan tetap pada kekuatan Republik Islamnya yang tidak menerima intervensi dari negara manapun (http://www.dw.de/presiden-iran-rouhani-berpidato-di-pertemuan-davos/a-17382818 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Beberapa bulan Hassan Rouhani berpapasan dengan kepemimpinan Hu Jintao di Tiongkok, namun Rouhani belum melakukan perubahan apapun dalam hubungannya dengan Tiongkok. Baru pasca Hu Jintao digantikan oleh Xi Jinping, Hassan Rouhani banyak melakukan perundingan dan menghasilkan beberapa kerjasama di berbagai bidang dengan Tiongkok (http://article.wn.com/view/2014/05/16/IranTiongkok_perluas_seluruh_hubungan_dan_kerja_sama/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Di masa kepemimpinan Rouhani, Iran tidak memberikan respon apapun terkait dukungan Tiongkok saat dipimpin oleh Hu Jintao. Rouhani hanya melanjutkan kerjasama-kerjasama yang telah terjalin di masa kepemimpjnan sebelumnya, juga terkait keberlangsungan pemberian pasokan gas dari Iran kepada Tiongkok yang telah berjalan selama 9 tahun terhitung dari tahun 2004.

Hubungan timbal balik kedua negara membuat ikatan yang kuat baik bagi Tiongkok maupun bagi negara Iran. Tiongkok dan Iran sama-sama dapat memenuhi kepentingan nasional kedua negara dan meredakan secara perlahan konflik internasional mengenai masalah nuklir Iran walaupun belum sepenuhnya dapat diselesaikan karena sikap keras negara barat yang terus memberikan sanksi bagi Iran.

4.5 Polemik Nuklir Iran dan Pihak-Pihak Lain yang Terlibat

Pengembangan nuklir di Iran sebenarnya bukanlah sebuah masalah besar, namun sejak terjadinya Revolusi Islam di Iran, Ayatulloh Khomeini menghapuskan proyek pengembangan nuklir ini karena dianggap sebagai

salah satu keinginan Syah Iran waktu itu Reza Pahlevi untuk "mem-Baratkan" Iran. Namun karena masalah krisis keuangan, memburuknya hubungan hubungan Iran dan Barat serta kekacauan pasca perang dengan Irak membuat Iran yang dipimpin oleh Rafsanjani memulai kembali pengembangan nuklir di Iran untuk dijadikan sember listrik sehingga dapat mengurangi pengeluaran Iran.

Memburuknya hubungan dengan Barat juga ternyata memunculkan polemik di dunia internasional karena pengembangan nuklir di Iran dianggap sebagai rencana Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika yang membantu pertama kali untuk proses *research* nuklir di Iran menganggap Iran mampu melakukan pengembangan senjata nuklir sehingga meminta PBB untuk menangani kasus ini.

Mulai dari tahun 2003 sejak kasus pengembangan nuklir Iran menjadi masalah, Amerika mulai menjadikan ini masalah internasional sehingga tahun 2006 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertama terkait sanksi bagi Iran karena melakukan pelanggaran terhadap NPT. Dewan Keamanan tetap PBB meminta IAEA untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua reaktor nuklir di Iran namun tidak ditemukan pengembangan senjata nuklir yang dicurigai oleh Amerika Serikat, namun IAEA juga mengatakan bahwa Iran tidak memberikan akses kepada IAEA untuk memeriksa beberapa reaktor nuklir Iran.

Hal ini menambah kecurigaan Barat terutama Amerika Serikat bahwa Iran melakukan pengembangan senjata nuklir, sehingga Amerika Serikat melalui

Dewan Keamanan Tetap PBB mengeluarkan resolusi kembali untuk memberi sanksi bagi Iran. Sejak resolusi pertama Tiongkok dan Rusia melakukan penolakan untuk memberi sanksi bagi Iran dan berharap negara-negara Barat dapat melakukan diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini, karena selain Iran adalah negara yang keras, namun juga Tiongkok dan Rusia adalah negara sahabat Iran yang selama ini memberikan bantuan bagi pengembangan nuklir di Iran.

Selain Tiongkok, dalam hal ini Rusia juga menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan bagi pengembangan nuklir di Iran dan mmiliki pandangan yang sama dengan Tiongkok dalam hal ini. Dua negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB ini tentunya mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi keberlangsungan pengembangan nuklir di Iran karena dapat menghindarkan Iran dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB walaupun sebagian besar sanksi yang terdapat dalam resolusi tersebut merupakan sanksi khusus yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk Iran (http://www.islamtimes.org/vdce7x8wejh8vni.rabj.html diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Selain daripada dukungan yang diberikan oleh Rusia sebagai pihak lain dalam masalah pengembangan nuklir di Iran, peneliti juga menemukan keterkaitan Israel dalam polemik yang terjadi mengenai masalah nukli Iran ini juga. Menurut hasil studi pustaka, Israel merupakan sekutu terkuat Amerika Serikat di Timur Tengah yang menentang pengembangan nuklir di Iran karena bilamana Iran memiliki senjata nuklir dan terjadi masalah di kemudian

hari antara Iran dengan Amerika Serikat, maka Israel akan menjadi salah satu sasaran Iran sebagai sekutu Amerika Serikat yang posisinya terdekat dengan Iran (http://m.sindonews.com/read/865424/43/cemaskan-nuklir-israel-ketakutan-jika-dimusnahkan-iran diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Memang dalam pengembangan nuklir Iran ditemukan kejanggalan-kejanggalan sanksi yang mana saat dicari kesalahan mengenai pengembangan nuklir ini tidak ditemukan adanya penyimpangan. Hubungan Iran dengan Barat yang dikenal sangat bermusuhan juga dapat menjadi alasan kuat sehingga munculnya polemik nuklir Iran ini. Banyak negara yang memberikan dukungan bagi Iran, namun tidak sedikit juga negara yang setuju untuk memberi sanksi bagi Iran karena takut Iran mengembangkan senjata nuklir. Hingga saat ini masalah pengembangan nuklir di Iran masih menjadi masalah internasional yang akan melibatkan banyak pihak sehingga penelitian mengenai masalah ini dapat terus dilakukan sehingga dapat dilihat perkembangannya di dunia internasional.